

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Amiruddin, Z. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bambang, S. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Bambang, W. (2012). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafik.
- BPJS Kesehatan. (2016). *Buku Panduan Layanan Bagi Peserta BPJS Kesehatan*. Jakarta.
- Hasbullah, T. (2015). *Jaminan Kesehatan Nasional (Edisi Kedua)*. Jakarta: PT Raja Grafindopersada.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2012). Jakarta: Balai Pustaka.
- Mona. (2015). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Undang-Undang Keperawatan dan Tenaga Kesehatan*. Bantul: Pustaka Mahardika.
- Niken, C. (2017). *Jejaring Bidan dengan BPJS*. Yogyakarta: Akbid Yogyakarta.
- Pan, H. J., Archer, R., & Kolesar, R. (2022). *Health Financing, and Equity Impact of Enhanced Private Midwife Contract Under Indonesia's National Health Insurance Scheme*. Washington DC: Paladium Health Policy Plus.
- Peter, M. (2016). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.

- Peter, M. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Salim, dkk. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*. Cetakan Pertama. Jakarta: Rajawali Press.
- Soerjono, S. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono, S. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soerjono, S. (2019). *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*. Bandung: Remadja Karya CV.
- Surachmindari, & Rita, Y. (2013). *Konsep Kebidanan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Zainudin, A. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 75.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29.

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1416.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464 Tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 589.

Jurnal

Indria, N. (2015). Mutu Pelayanan Bidan Praktek Mandiri (BPM) Kota Surabaya. *Jurnal Pascasarjana Kedokteran UNS*, 7.

Ikatan Bidan Indonesia. (2021). Data penggantian klaim dari JKN. Jakarta: Ikatan Bidan Indonesia.

Nurlie, A. (2017). Analisis Keikutsertaan Bidan Praktik Mandiri pada Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi Tahun 2017. *Jurnal FKM UI*, Depok.

Qhisti, S. (2015). Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan di RSUD Haji Surabaya. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 3(2).

- Rina, L. dkk. (2015). Persepsi Bidan Praktek Mandiri (BPM) Terhadap Perubahan Skema Pembiayaan dari Jampersal ke Jaminan Kesehatan Nasional di Bali. *Laporan Penelitian, FK Udayana.*
- Siti, S. dkk. (2017). Persepsi Bidan Praktek Mandiri (BPM) terhadap Paket Persalinan BPJS dalam Keberlanjutan Kerjasama menjadi Provider dalam Jejaring Dokter Keluarga di Kota Bengkulu. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 6(1).
- Timmy, L. dkk. (2019). Analisis Faktor yang Berhubungan dengan Keikutsertaan Bidan Praktek dalam Pelayanan Kebidanan pada Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018. *Jurnal Kesehatan Andala.*

Lain-lain

- BPJS Kesehatan. (n.d.). Tugas Fungsi dan Wewenang. Diakses dari <https://www.jamsosindonesia.com> pada 11 April 2023, pukul 18.00.
- Kementerian Kesehatan. (n.d.). Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan 2011-2015. Jakarta.
- Kemenkes. (2016). Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Diakses dari <https://promkes.kemkes.go.id/?p=5799> pada 7 April 2023, pukul 22.00.
- Srikandi, R. (n.d.). Pengertian BPJS Kesehatan. Diakses dari <https://seputarpengertianbpjs.com> pada 08 April 2023, pukul 17.27.